

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilatar belakangi karena kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh para guru honorer dan tenaga kependidikan dari pemerintah. Sehingga adanya suatu kerja sama antara Lembaga Bantuan Hukum Ansor dengan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan demi mendorong keluarnya peraturan daerah mengenai kesejahteraan guru honorer dan pendampingan hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / *Non Government Organization* (NGO) merupakan bagian dari *civil society* yaitu sebagai wadah para aktor *intermediary* (penghubung) antara masyarakat dan pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aktor *Intermediary*, *Civil Society* dan Gerakan Sosial Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai aktor *intermediary* dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / *Non Government Organization* (NGO) sebagai bagian dari *civil society*, yang sering mengisi ruang publik negara demokrasi. LBH Ansor ini bertujuan untuk memberikan suatu layanan bantuan hukum kepada rakyat miskin atau kurang mampu, buta hukum dan tertindas khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya yang dilakukan LBH Ansor ini adalah memperjuangkan kesejahteraan agar terdorongnya peraturan daerah tentang kesejahteraan guru honorer. Karena pada dasarnya para guru honorer yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini masih belum merasa menerima suatu kesejahteraan yang cukup. Sehingga jika kesejahteraan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pihak pemerintah, maka kegiatan belajar mengajar akan lumpuh dan tanpa kesejahteraan itu akan menimbulkan ketidak ikhlasan. Sedangkan kegiatan belajar mengajar disekolah saat ini ditopang oleh kehadiran guru honorer yang jumlahnya lebih banyak dari pada ASN yang ada di kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga Lembaga Bantuan Hukum Ansor di dalam Launching MoU (*Memorandum of Understanding*) tersebut akan melakukan pendampingan Hukum bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: *Aktor Intermediary, Gerakan Sosial Baru, Guru Honorer.*